

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang selama ini dipuji oleh para ekonomi dunia karena bisa *survive* dari terpaan krisis ekonomi global. Krisis yang terjadi akibat *subprime mortgage* di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2008 silam. Krisis global menyebabkan pasar *financial* bergejolak akibat ketidakpastian, akhirnya terjadi kemacetan aliran modal yang mengganggu perdagangan dan secara sistemik berefek pada pertumbuhan ekonomi. Secara normatif di dalam *masterplan* percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, program utama pemerintah bertujuan untuk mendorong daulat perekonomian nasional dengan menysasar sektor riil seperti pertanian, industri, pertambangan, *energy*, kawasan strategis, kelautan, dan pariwisata. Namun konsep ini belum diimplementasikan sepenuhnya. (Rosmiati, 2012)

Sejarah telah menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Ravik dan Heru dalam Rifda dkk (2012).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. (Iman dan Adi dalam Rifda dkk, 2012)

UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan iklim usaha, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Contohnya produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan.

Dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan UKM dari tahun ke tahun, dimana tahun 2013 sebesar 99,99 persen . Tiap tahun persentase jumlah UKM dibandingkan total perusahaan pada sebesar 0,01 persen Pada tahun yang sama, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor UKM pada tahun 2013 mencapai 96,99 persen dari total tenaga kerja. Demikian juga sumbangannya pada Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga yang berlaku juga besar. lebih dari separuh ekonomi kita didukung oleh produksi dari UKM pada tahun 2013 (60,34 persen). Data-data tersebut menunjukkan bahwa peranan UKM dalam permodalan indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan

dan menghasilkan output. Keberadaan koperasi dan usaha kecil dan menengah di Indonesia sangat berpengaruh pada proses pengembangan perekonomian yang sedang bangkit untuk tumbuh dan berkembang menuju kemakmuran bangsa, akibat adanya krisis global yang melanda di seluruh negara di dunia, sehingga seluruh sektor ekonomi terkena imbasnya. Sektor dan UKM juga ikut terkena dampaknya, karena keduanya berperan sekali dalam menopang perekonomian negara.

Peranan UMKM dalam menopang perekonomian nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensi, ketangguhan maupun kontribusinya terus meningkat. Keberhasilan UMKM ini dikarenakan:

1. UMKM tidak memiliki utang luar negeri dan tidak banyak utang ke perbankan.
2. Sektor-Sektor kegiatan UMKM, seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain-lainnya tidak bergantung sumber bahan baku dari luar negeri. UMKM menggunakan bahan baku lokal.
3. Walaupun belum semuanya, UMKM berorientasi ekspor. Dapat dikatakan UMKM merupakan soko guru perekonomian nasional. Sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012-2013 mencapai 59,08 persen -60,34 persen, dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 97 persen (Kementerian dan UKM, 2015).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99 persen dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 57,895,721 juta unit (Kementerian Koperasi dan Dinas Kecil Menengah, 2013). Dari total PDB atas dasar harga berlaku (Rp 8.241,9 triliun), sebanyak 59,08 persen berasal dari UMKM (Usaha Mikro: 35,81 persen, Usaha Kecil: 9,68 persen dan Usaha Menengah: 13,59 persen), sedangkan dari Usaha Besar adalah 40,92 persen. Selain itu, UMKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja (menyerap 97,3 persen dari total angkatan kerja yang bekerja) dan memiliki jumlah yang besar dari total unit usaha di Indonesia serta kontribusi yang cukup besar terhadap investasi di Indonesia yaitu sebesar Rp 1.655,233 miliar atau 63,42 persen dari total investasi pada tahun 2013 (Kementrian Koperasi dan UMKM, 2015).

Kontribusi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu berperan serta dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu tentang kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Sejak tahun 2009 sampai 2013, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional pada tahun 2013 sebesar 60,34 persen dan lebih besar dari kontribusi usaha besar yang sebesar 39,66 persen. Hal tersebut memperlihatkan bahwa UMKM berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengan demikian pemerintah sebaiknya dapat

memperhatikan dan membuat kebijakan yang tepat, agar UMKM dapat tumbuh dengan pesat.

Tabel 1.1

Kontribusi UMKM Terhadap PDB Dalam Persen

Tahun	UMKM	Usaha besar
2009	56,12	43,82
2010	56,22	43,78
2011	58,05	41,95
2012	59,08	40,92
2013	60,34	39,66

Sumber: Dinas Kementerian Koperasi dan UKM (2014)

Kontribusi UMKM yang lain adalah UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dari tabel 1.2 dapat dilihat penyerapan tenaga kerja memperlihatkan kenaikan, dari 6.447.260 tenaga kerja pada tahun 2010 menjadi 9.734.111 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang selanjutnya dapat membantu perekonomian dalam hal pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi di daerah. Rata-rata per tahun, UMKM dapat memberikan peluang pekerjaan bagi 8.396.823.5 orang, atau 64, 23 persen dari seluruh jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Tabel 1.2

Tenaga Kerja dan Pangsa UMKM serta Usaha Besar Tahun (2010-2013)

tahun	Jumlah usaha Mikro dan kecil		Jumlah Usaha besar dan sedang	
	jumlah	Pangsa %	Jumlah	Pangsa %
2010	6.447.260	58,89	4.501.145	41.11
2011	8.274.635	64,12	4.629.369	35.88

2012	9.131.288	64,94	4.928.839	35.06
2013	9.734.111	68,95	4.382.908	31.05

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah UMKM menjadi prioritas nasional dalam percepatan pembangunan. UMKM menjadi prioritas nasional karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak, dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan sehingga berkurangnya pengangguran. (Muhril dalam Isnaini Nurahmah, 2014)

Banyaknya kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak membuat UMKM terlepas dari masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, serta kesulitan dalam pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalahmasalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani tetapi juga berbeda antarwilayah, antarsentra, antarsektor/ antarsubsektor atau jenis kegiatan dan antar unit usaha dalam kegiatan/ sektor yang sama. (Tambunan dalam Isnaini Nurahmah, 2002: 73)

Mengingat besarnya peran UMKM tersebut, maka pemerintah melalui instansi terkait terutama Kementerian dinas perindustrian, perdagangan, dan UKM telah meluncurkan berbagai program bantuan. Kebijakan pemerintah

untuk mendorong Usaha Kecil dan Menengah cukup serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa Usaha Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan Usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Namun demikian disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen SDM, kewirausahaan. (Rosmiati, 2012)

Permasalahan dari hampir semua Usaha Kecil yang tidak bisa berkembang adalah karena kurangnya modal yang mereka miliki dan kebutuhan dana tambahan dari pihak luar baik itu berupa bantuan dari pemerintah maupun kredit pinjaman dari lembaga keuangan. (Danil dalam Ni Wayan dkk, 2014)

Mengembangkan usaha dan memperluas pangsa pasar UKM pastilah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan adanya bantuan dari pihak-pihak yang terkait dengan UKM diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perekonomian Indonesia semakin kongkrit, yang terdiri dari berbagai aspek usaha. Mulai dari Pendanaan, Produksi, Distribusi, Pemasaran dan

Pemberian Pendidikan atau Penyuluhan terhadap inovasi-inovasi baru dalam produk, serta penyuluhan terhadap manajemen keuangan yang berbasis syariah. Karena kebanyakan para pelaku UKM berpendidikan rendah sehingga perlu adanya pemberian materi *skill* untuk menjalankan usahanya. (Yuda Septi Fitri, 2014)

Pertumbuhan usaha memiliki peran yang cukup, Sektor UKM juga memiliki kelemahan yang dapat membuat UKM sulit berkembang dibandingkan usaha-usaha besar. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut seperti terbatasnya modal yang dimiliki, Manajemen yang lemah, Kurangnya Pemanfaatan Informasi dan Teknologi, Kurang mampu dalam pemanfaatan Jaringan Usaha, dan akses ke Pasar yang minim. Salah satu kendala dalam perkembangan Usaha Kecil dan Menengah adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan.

Menurut Kim bahwa intervensi untuk memutus rantai permasalahan ini dapat saja dilakukan jika ada komitmen yang kuat dari Pemerintah dan Masyarakat melalui pemberian pinjaman modal. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk melaksanakan perkuatan dibidang permodalan, belum terlihatnya pengaruh nyata dari intervensi Pemerintah tersebut dikarenakan sangat kecilnya dana-dana Pemerintah yang disalurkan dibandingkan dengan besarnya jumlah UMKM yang membutuhkannya. (Rifda dan Hendra, 2012)

Keberadaan UKM secara prospektif mempunyai nilai strategis bagi Indonesia. Proporsi peranan yang begitu besar menyangkut banyaknya tenaga kerja yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Menteri Negara urusan , Usaha Kecil dan Menengah berusaha melakukan pengembangan dan penyelenggaraan lembaga dan sistem pembiayaan UKM dengan berbagai pendekatan. Diantaranya melalui yang berada dari pusat maupun ke pelosok daerah.

UKM yang berada di Daerah Yogyakarta tetap menjadi salah satu tumpuan utama untuk kegiatan ekonominya. Dengan sektor pariwisata yang ada di Yogyakarta tentu saja menjadi potensi yang sangat menguntungkan untuk UKM itu sendiri. Produk hasil UKM bisa dengan mudah dipasarkan di daerah sendiri dan dapat pula dipasarkan ke luar daerah, dengan pertimbangan apabila permintaan di daerah sendiri sudah terpenuhi.

Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di DIY tahun 2015 jumlah UKM sebanyak 220.703 UKM. Jumlah usaha kecil dan menengah di Kota Yogyakarta tiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang produktif, karena adanya pertumbuhan dan iklim Usaha Kecil dan Menengah yang membaik dan kondusif. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat terjadi Krisis Ekonomi, usaha kecil dan menengah lebih *resisten* dibanding perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Hal inilah yang akan terus dijaga dan ditingkatkan melalui rencana fasilitasi permodalan yang mampu

mengembalikan perekonomian masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar-benar sehat sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha kecil dan menengah.

Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi DIY. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 dan telah direvisi / diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2010 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas dan UPT Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil/Menengah. Tugas DISPERINDAGKOP yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil/Menengah, Serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas perbankan yang diberikan Pemerintah. Fungsi salah satunya adalah Fasilitas, Pembinaan, Perlindungan, Pemasaran, dan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah.

Salah satu program dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM adalah pemberian bantuan modal dalam bentuk peralatan atau barang *hibah* kepada Kelompok Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (KPUMK) yang mendapat pembinaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM (DISPERINDAGKOP) Kota Yogyakarta. Kelompok pelaku usaha kecil dan menengah ini terdapat di beberapa kabupaten yang ada di Kota Yogyakarta yang terdiri dari beberapa kelompok usaha. Setiap kelompok mempunyai anggota yang merupakan pelaku usaha kecil dan menengah.

Perkembangan UKM menjadi penting sebagaimana telah diulas di depan tentang kontribusi UKM. Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kota Yogyakarta, diharapkan UKM dapat berkembang. Perkembangan UKM dapat dilihat dari adanya perbedaan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan berupa barang *hibah* atau peralatan, apabila ada perkembangan UKM sesudah mendapatkan bantuan berupa peralatan atau barang *hibah* berarti bantuan tersebut berhasil dan apabila sesudah mendapat bantuan dari DISPRINDAGKOP tidak terjadi perkembangan berarti bantuan tersebut belum berhasil.

Menurut Purdi E. Chandra bahwa, Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan (Isnaini Nurrahmah, 2015). Sesuai dengan para peneliti (Kim dan Choi, 1994; Lee dan Miller, 1996; Lou, 1999; Miles at all, 2000; Hadjimanolis, 2000) yang menguatkan pernyataan Purdi E Chandra perkembangan UMKM dapat diukur dengan jumlah omset penjualan, jumlah tenaga kerja dan jumlah pelanggan. Suatu usaha dapat dikatakan berkembang apabila omset penjualan naik, ketika omset penjualan mengalami kenaikan berarti jumlah pelanggan juga bertambah, dan ketika jumlah pelanggan bertambah pihak UMKM akan menambah jumlah tenaga kerja untuk melayani pelanggan. Muhammad Sholeh (2008)

Dalam penelitian ini, obyek penelitian adalah kelompok pelaku usaha kecil dan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat bantuan modal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY.

Dengan melihat penjelasan di atas, dengan permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah dalam permodalan serta pengaruh kebijakan maupun peran pemerintah dalam membantu pengembangan usaha kecil dan menengah maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai analisis Kinerja UKM DIY.

B. Rumusan Masalah penelitian

Salah satu program Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu memberikan bantuan modal berupa barang *hibah* atau peralatan kepada Usaha Kecil dan Menengah antara lain di beberapa Kabupataen yang berada di Wilayah Yogyakarta. DISPRINDAGKOP memberikan pembinaan dan perbaikan dari segi sosialekonomi.

Salah satu hambatan dalam perkembangan Usaha Kecil dan Menengah adalah keterbatasan dana yang dimiliki serta sulitnya mendapatkan sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi modal dalam mendukung produksi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu

1. Apakah omset penjualan berpengaruh terhadap keuntungan penjualan?
2. Apakah modal usaha berpengaruh terhadap keuntungan penjualan?
3. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap keuntungan penjualan
4. Apakah modal usaha sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap keuntungan penjualan?

5. Apakah strategi kebijakan yang tepat untuk perkembangan UKM DIY.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui omset penjualan terhadap keuntungan penjualan.
2. Untuk mengetahui modal usaha berpengaruh terhadap keuntungan penjualan
3. Untuk mengetahui tenaga kerja berpengaruh terhadap keuntungan penjualan.
4. Untuk mengetahui bantuan modal sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap keuntungan penjualan.
5. Untuk mengidentifikasi strategi kebijakan yang tepat untuk perkembangan UKM DIY.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yaitu tentang pengaruh bantuan modal dalam bentuk peralatan atau barang hibah terhadap pengembangan usaha UKM.

2. Praktis

- a. Bagi instansi terkait

Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh bantuan modal yang berupa barang dan peralatan yang diberikan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah daerah maupun instansi pendukung dalam menentukan arah dan kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah di Yogyakarta.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti khususnya peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memberikan bantuan yaitu tentang adanya perbedaan setelah dan sesudah mendapat bantuan berupa barang *hibah* atau peralatan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY terhadap pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

c. Bagi mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang bantuan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang bantuan DISPRINDAGKOP terhadap perkembangan UKM sebelum dan sesudah menerima bantuan berupa barang atau peralatan di DIY.